

## **Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan keluarga Miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun**

**Listy Julfani, Ilham Mirzaya Putra**  
**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**  
[listy0103192037@uinsu.ac.id](mailto:listy0103192037@uinsu.ac.id), [ilhammirzaya@uinsu.ac.id](mailto:ilhammirzaya@uinsu.ac.id)

### **ABSTRACT.**

*The Family Hope Program (PKH) was implemented in Kerasaan I Village, Pematang Bandar District, this analysis seeks to determine the program's effects on improving the welfare of low-income families and lowering poverty rates. The Simalungun Regency. In this study, qualitative research with descriptive techniques is used. In order to gather data, researchers used observation, interviews with three participants—PKH coordinators, companions, and beneficiaries—as well as PKH records from Kerasaan I Village in Pematangbandar District, Simalungun Regency. Kerasaan I Village served as the site of the research. Data types and sources included both secondary and primary sources. Industrial techniques, data presentation, and conclusion-drawing are all examples of data analysis techniques. Triangulation and focus group discussions (FGD) are used as part of the data validation process. The results of this study show that the Family Hope Assistance Program (PKH) has helped the poor in Kerasaan I Village, Pematang Bandar District, Simalungun Regency, by boosting their economic situation.*

**Keywords:** *Family Hope Program, Economy, and Aid*

### **ABSTRAK.**

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan di Desa Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar, analisis ini berupaya untuk mengetahui pengaruh program terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah dan penurunan angka kemiskinan. Kabupaten Simalungun. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan observasi, wawancara dengan tiga partisipan—koordinator PKH, pendamping, dan penerima manfaat—serta catatan PKH dari Desa Kerasaan I Kecamatan Pematangbandar, Kabupaten Simalungun. Desa Kerasaan I dijadikan sebagai lokasi penelitian. Jenis dan sumber data termasuk sumber sekunder dan primer. Teknik industri, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah contoh teknik analisis data. Triangulasi dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan sebagai bagian dari proses validasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH) telah membantu masyarakat miskin di Desa Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dengan meningkatkan perekonomian mereka.

**Kata kunci:** *Program Keluarga Harapan, Perekonomian, dan Bantuan*

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia ialah negara terpadat keempat setelah Amerika Serikat di dunia, dengan proyeksi total masyarakat bekisar 268 juta jiwa di tahun 2020. Bagian ini menjadikan Indonesia *sensitive* pada problema ekonomi yang berpotensi langsung pada kemiskinan. Banyak orang di Indonesia masih hidup dalam kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Serta ditengah pandemi yang melanda dunia termasuk negara kita, susunan yang biasa normal kini menjadi berubah sesuai peraturan yang sudah ditetapkan (Rosalina, 2019).

Kemiskinan ialah kondisi yang sifatnya multidimensi serta sulit untuk diartikan pada makna tunggal (Hanif et al., 2020). Dari sekian banyak spesialis dalam berbagai disiplin ilmu yang telah mencoba menerjemahkan konsep kemiskinan, namun tidak satupun dari mereka yang menyetujui konsep kemiskinan bersama. Serta berbagai macam sudut pandang yang digunakan mulai dari sudut pandang finansial, sudut pandang sosiologis, hingga sudut pandang kualitas yang mendalam.

Sebagai agama kemanusiaan universal, Islam meyakini kesuksesan manusia di dunia serta akhirat. Pada Islam, orang beriman bertujuan untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Sebagaimana Allah berfirman dalam kitab sucinya Al-Quran, mengajak orang beriman untuk berdoa:

وَقِنَا حَسَنَةَ الْعِزَّةِ وَأَوْفَى حَسَنَةً لِّدُنْيَا وَإِنَّا لَنَقُولُ مَن وَمِنْهُمْ  
لِئَلَّا نَكُونَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka"(Departemen Agama RI, n.d.-b).

Oleh karena itu, mempertahankan masyarakat yang ideal berdasarkan keadilan, kesetaraan dan kebaikan adalah tujuan utama Negara Islam. Hal ini karena Negara Islam tidak begitu saja melaksanakan kerangka ibadah kepada Allah (khususnya ibadah dan doa), tetapi juga sistem zakat. Dengan kata lain, tujuan Negara Islam adalah kesejahteraan setiap orang secara mendalam dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Negara Islam merupakan negara kesejahteraan yang melakukan banyak fungsi selain fungsi tradisional negara. Untuk mencapai kesejahteraan materi, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat, harus dipastikan penyelenggaraan sistem jaminan sosial, dsb. Tugas memperoleh kemampuan psikis orang termasuk menjaga sistem kehidupan Islam bagi umat Islam dan kebebasan beragama bagi non-Muslim.

(Ada empat ukuran utama kebahagiaan: Pertama-tama, itu merupakan dasar-dasar kesejahteraan. Landasan kemakmuran terletak ketika nilai-nilai ajaran Islam menjadi panglima tertinggi kehidupan ekonomi suatu bangsa. Jika kita bertentangan secara diametral dengan aturan Allah SWT, kita tidak akan pernah mencapai kemakmuran yang hakiki. Menolak SWT-nya Allah justru menimbulkan kerugian bagi kesejahteraan umat manusia. Ini dinyatakan sebagai QS. Thaha: 124).

أَعْمُ الْفَيْمَةِ يَوْمَ وَنَحْشُرُهُ ضَنْكًا مَعِيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِكْرِي عَنْ أَعْرَضٍ وَمَنْ

Artinya: “Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta”.(Departemen Agama RI, n.d.-a)

Kedua, kegiatan ekonomi merupakan prasyarat untuk kemakmuran. Penguatan sektor riil, khususnya perdagangan dan industri, menjadi jantung kegiatan perekonomian. Andalan ekonomi Islam, sektor real estate ini mempekerjakan mayoritas angkatan kerja. Karena sektor riil merupakan pondasi dari seluruh kontrak dan transaksi keuangan syariah, maka kinerja sektor riil dioptimalkan oleh sektor keuangan syariah. Indikator ketiga adalah pemenuhan kebutuhan fundamental dan rencana distribusi. Orang yang tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya tidak akan tumbuh. Begitu pula jika hanya sebagian orang yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sedangkan yang lain tidak. Dengan kata lain, faktor penting dalam menentukan standar kesejahteraan adalah sistem distribusi ekonomi. Islam menegaskan bahwa sistem distribusi yang baik adalah yang menjamin rendahnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan serta perputaran ekonomi untuk pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Metrik terakhir yang juga digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah dimensi keamanan dan tatanan sosial. Jika suatu masyarakat mampu menghentikan atau mengurangi prasangka, konflik antar kelompok, dan penyakit sosial lainnya, yang merugikan masyarakat, maka masyarakat dikatakan sejahtera. Tanpa rasa takut dan kecemasan, kemakmuran tidak mungkin terjadi.

Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai Ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak, baik dari segi ekonomi, sosial dan spiritual. Pemahaman ini berfokus pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut pengertian lain dari kuliahnya, “Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seorang individu atau rumah tangga sulit memenuhi kebutuhan dasarnya dan lingkungan yang mendukung tidak memberikan kesempatan untuk terus meningkatkan kesejahteraan atau reproduksi.”

Rumah keluarga miskin pada umumnya mengacu pada rentang negara dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Karena tingkat pendidikan yang rendah, efisiensi penduduk juga menurun, dan kompensasi yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, kesejahteraan, penginapan dan pendidikan. (Yusdha et al., 2022). Akibatnya, keluarga miskin juga akan melahirkan keluarga miskin di era berikutnya.

Dari banyaknya masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menciptakan sejumlah inisiatif untuk memeranginya dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun karena saling berdekatan dan tidak diimbangi dengan kegiatan outreach dan community building lainnya, berbagai program tersebut cenderung membuat masyarakat bergantung pada bantuan pemerintah (Yandra et al., 2020). Program Keluarga Amanah (PKH) adalah salah satu inisiatif yang perlu dihapuskan. Menurut arsip Koordinasi Program Penanganan Fakir Miskin yang ditangani oleh pusat informasi dan teridentifikasi sebagai keluarga penerima manfaat PKH, PKH dapat berbentuk program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang tidak berdaya. Jika Keluarga Tercinta (KPM) menyelesaikan program penghindaran kepentingan dan dapat melaksanakan komitmennya, mereka diberikan akses ke Program Amanah Keluarga (PKH), dan semua KPM di keluarganya berhak mendapatkan bantuan. Komitmen yang akan dibuat terutama difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia di segmen kesejahteraan dan pendidikan. (Utomo dkk., 2019).

Pemeriksaan ibu hamil atau menyusui dan anak usia 0-6 tahun wajib dilakukan di bidang kesehatan, serta pemberian nutrisi dan vaksinasi. komitmen terhadap pendidikan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan pendidikan dengan tingkat kehadiran minimal 85% pada hari pembelajaran yang sebenarnya. Selain itu, kami mengikuti Musyawarah Pembangunan Keluarga (P2K2) dan pertemuan kelompok bulanan (group meeting). Kelompok sasaran PKH yang dulu terfokus pada rumah tangga, kini terfokus pada keluarga. Modifikasi tersebut dimaksudkan untuk mencerminkan prinsip keluarga bahwa satu orang tua bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anaknya. Keluarga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Dalam Program Data Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, PKH berfokus pada keluarga yang berpenghasilan rendah dan rentan. Wanita hamil atau menyusui, bayi, dan anak di bawah usia enam tahun termasuk dalam segmen kesehatan program.

Siswa SMK/MA sederajat, siswa SD/MI sederajat, siswa SMA/MTS sederajat, dan anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun semuanya termasuk dalam standar pendidikan ini. Sejak 2016, komponen bantuan sosial telah ditambahkan ke tunjangan berbasis kebutuhan yang diberikan kepada orang berusia 60 tahun ke atas dan kepada penyandang disabilitas yang memiliki disabilitas berat. Ahmad dkk. , 2020). Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah menawarkan Program Keluarga Amanah (PKH) sejak tahun 2007. Bantuan terkoordinasi, juga dikenal sebagai pertukaran uang bersyarat atau CCT, terbukti sangat berhasil dalam mengurangi kemiskinan, terutama kemiskinan yang persisten, di negara-negara tersebut. (Murah, 2016). Menyebarkan manfaat PKH dengan membentuk PKH-KPM yang meliputi menghadiri pertemuan bulanan atau pertemuan kemajuan keluarga (P2K2), memenuhi komitmen sesuai dengan karakteristik komponen PKH, dan melengkapi komponen pendaftaran (memenuhi persyaratan). Surat persetujuan dari keluarga dan kepala jaminan

sosial menentukan besaran honorarium. Setiap tahun, empat tingkat bantuan ditawarkan, dengan batas empat penerima per keluarga.

Bantuan Non-Perubahan dan Bantuan Pecahan adalah dua kategori yang dibagi dalam Bantuan Sosial PKH pada tahun 2019. Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia No. Menurut Pasal 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi di mana kebutuhan dasar, materi, dan sosial masyarakat terpenuhi, memungkinkan orang untuk hidup relatif memenuhi kehidupan dan mengembangkan serta melatih keterampilan sosial mereka (Kesejahteraan Sosial, 2009).

Kebutuhan terbaik di era maju ini dipenuhi oleh inisiatif pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH), program jaminan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memajukan kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia, merupakan salah satu inisiatif yang diluncurkan. Kota Citarasa I, Kawasan Bandar Pematang, Kabupaten Simalungun sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, merupakan pusat yang paling banyak melaksanakan program PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang sebagai program jaminan sosial yang komprehensif dengan tujuan memberikan bantuan anggaran kepada keluarga prasejahtera untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pendidikan, kesejahteraan, dan tempat tinggal (Zaenudin, 2017). Untuk meningkatkan kualitas hidup dan memutus rantai kemiskinan, keluarga prasejahtera dianggap dapat memperoleh aset yang diperlukan dengan bantuan ini (Kementerian Sosial, 2019).

Dalam konteks kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun pelaksanaan PKH telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Salah satu dampaknya adalah peningkatan akses terhadap pendidikan. Bantuan finansial yang diberikan oleh PKH memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin untuk mengenyam pendidikan formal yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, anak-anak tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan prospek masa depan mereka (Royani, 2021).

Selain itu, PKH juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan keluarga kurang mampu pada kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Bantuan finansial yang diberikan melalui program ini dapat digunakan untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti perawatan kesehatan rutin, vaksinasi, dan pengobatan yang diperlukan. Dengan adanya akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, keluarga miskin dapat mencegah penyakit, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan harapan hidup mereka (Suharto & Thamrin, 2012).

Selain manfaat langsung yang diberikan kepada keluarga miskin, PKH juga berpotensi memberikan dampak positif pada kelurahan Kerasaan I, Kecamatan

Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin, dapat terjadi peningkatan daya beli dan konsumsi di wilayah tersebut, yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan seluruh komunitas di kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Namun, penting juga untuk mengakui bahwasannya program PKH memiliki tantangan dan keterbatasan tersendiri. Misalnya, terdapat kebutuhan untuk memastikan pendampingan yang efektif bagi keluarga penerima manfaat, serta memastikan dana yang diberikan digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan tujuan program.

Dalam penelitian ini, akan menyelidiki dampak konkrit serta menganalisis data dan informasi yang relevan, serta menggali pandangan dan pengalaman para keluarga penerima manfaat program ini dari PKH terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin
2. Bagaimana Penurunan tingkat kurang mampu setelah pemerintah mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun

## **METODE PENELITIAN**

Metode ini dapat berupa metode kualitatif, dengan strategi deskriptif. Pengumpulan berita acara pemeriksaan dalam bingkai persepsi, wawancara dilakukan dengan dua saksi pendamping PKH dan penerima PKH dan keluarga penerima (KPM) serta dokumentasi PKH, Kota Kerasaan I, Kawasan Bandar Pematang, Peraturan Simalungun. Pemeriksaan ini dilakukan di Kota Kerasaan I, Kawasan Bandar Pematang. Untuk jenis dan sumber informasi pencipta menggunakan informasi tambahan dan penting. Informasi penting mengacu pada data yang dikumpulkan melalui persepsi dan interaksi dengan Pendamping PKH Kerasaan I Kelurahan yang berpusat pada pengaruh PKH terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh melalui pertimbangan dokumentasi, arahan terkait, dan arsip lainnya terkait dampak PKH terhadap keberhasilan masyarakat di Desa Kerasaan I. Dalam renungan ini, pencipta menggunakan berbagai strategi dan alat untuk mengumpulkan informasi. Metode pengumpulan data menggabungkan penelusuran, organisasi, dan dokumentasi. Untuk memastikan keaslian catatan, penulis menganut pendekatan triangulasi sumber dan strategi, yang berarti bahwa informasi tersebut dikonfirmasi dan diverifikasi dari beberapa sumber yang berbeda.

Selanjutnya, dalam analisis data, penulis menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik reduksi digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dipahami dengan lebih baik. Selanjutnya, data disajikan secara jelas dan ringkas. Terakhir, kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

Untuk memastikan kevalidan data, penulis menggunakan beberapa metode validasi, termasuk triangulasi dan Focus Group Discussion (FGD). Triangulasi digunakan untuk mengonfirmasi dan memverifikasi data dari berbagai sumber yang berbeda. Selain itu, FGD digunakan untuk melakukan diskusi kelompok bersama KPM dan pendamping PKH guna mendapatkan perspektif dan wawasan yang lebih kaya mengenai dampak PKH pada kemakmuran rakyat. (Ayun et al., 2021)

Metode penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dalam bingkai verbal dan linguistik dalam pemahaman karakteristik tertentu, dengan pemahaman tentang keajaiban yang terkait dengan apa yang dialami oleh subjek yang bertanya, seperti perilaku, penegasan, inspirasi, aktivitas, dll. dengan strategi logis yang berbeda. Bagaimanapun, Lowland dan Taylor's melihat perbedaan. Mereka mencirikan analisis kualitatif sebagai metode penyelidikan yang melaporkan secara lisan atau berbicara tentang penggambaran individu dan perilaku yang dirugikan. Pendekatan penelitian kualitatif tentang pendekatan yang digunakan oleh Moleong menggabungkan wawancara sebagai instrumen untuk memahami sikap dan perilaku orang dan kelompok. Dalam perluasannya, wawancara terbuka digunakan untuk menyelidiki dan mendapatkan penyelidikan dari setiap sudut pandang. (Rahmi Ulfa Aulia, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu tujuan dari kegiatan keuangan pemerintah adalah untuk mengurangi kemiskinan sehingga terwujud ketenteraman masyarakat. Dimana wilayah bantuan sosial yang ditentukan dalam UU No. 11 Republik Indonesia tahun 2009? Bantuan sosial dapat menjadi suatu keadaan untuk memenuhi kebutuhan struktur, mental dan sosial suatu masyarakat sehingga individu dapat berjuang untuk menjalani kehidupan konvensional, menciptakan dan memenuhi kapasitas sosial mereka. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai keberhasilan bersama adalah Program Keluarga Amanah (PKH) yang termasuk dalam Klaster 1, yaitu sekumpulan program pengentasan kemiskinan berbasis bantuan dan jaminan sosial.

Berdasarkan tanya jawab dengan Fasilitator PKH yang disetujui oleh Bapak Syafaruddin Simanjuntak S.ip, Program Keluarga Amanah (PKH) dimana program ini dimulai secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melalui Dinas Sosial Republik Indonesia pada tahun 2007. Untuk Wilayah Simalungun PKH masuk pada awal tahun 2015. Mengapa disebut Program Keluarga Amanah? Sasaran PKH mengutamakan anak sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Di mana itu menunjuk pada individu yang tidak

berdaya untuk melarat atau keluarga yang berkecukupan. Untuk disebut kategori masyarakat prasejahtera sendiri ditentukan oleh Permensos No 262/HUK/2022.

Jika dilihat dari masyarakat miskin yang ditentukan Permensos biasanya masyarakat miskin rentan terhadap kemiskinan sangat sulit untuk bisa menyekolahkan anaknya karena keterbatasan ekonomi. Sehingga dalam hal ini pemerintah ingin memberikan dorongan motivasi terhadap masyarakat miskin ini memberikan harapan, bahwasannya pemerintah hadir untuk menghilangkan rasa kekhawatiran mereka terhadap pendidikan karena tidak adanya keuangan disini lah pemerintah hadir yang dituangkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan harapan kepada masyarakat bahwasannya mereka berhak mendapatkan pendidikan.

Untuk saat ini kementerian sosial bekerja sama dengan kementerian pendidikan kebudayaan dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Artinya seluruh penerima PKH berhak untuk mendapatkan Beasiswa KIP Kuliah. Sehingga PKH itu adalah program yang memberikan harapan kepada keluarga miskin atau rentan terhadap kemiskinan untuk bisa berharap sukses dan bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan masyarakat lainnya, artinya bisa mengikuti pendidikan bersaing dengan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lainnya (Wawancara, 01 Juni 2023).



*Gambar 1: Bersama Koordinator PKH Kelurahan Kerasaan 1*

## **Dampak Bantuan PKH Terhadap Masyarakat Miskin**

Dalam hal ini Program Harapan Keluarga (PKH) merupakan jaminan sosial yang dapat menyejahterakan dan membantu keluarga yang kurang mampu serta mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesejahteraan yang berkualitas bagi keluarga peserta PKH dengan keyakinan bahwa program ini dapat mengurangi kemiskinan. Kondisi sosial para penerima PKH di Kota Kerasaan 1 beberapa waktu belakangan ini nampak sebuah kondisi yang masih jauh dari kehidupan yang layak. Terutama di bidang pendidikan dan kesejahteraan. Beberapa KPM bekerja sebagai buruh tani, penjual kue dan beberapa tidak bekerja sama sekali. Situasi ini mempengaruhi upah bulan ke bulan yang aneh. Biasanya salah satu penghambat perkembangan pendidikan dan kesejahteraan. Setelah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), pembinaan dan kesejahteraan RTSM mengalami perubahan. Bagi yang sudah terlihat tidak menyekolahkan anaknya sejak ada PKH, penerima



bantuan bisa menawarkan bantuan biaya les anaknya. Ada dua dampak, yaitu dampak positif khusus dan dampak negatif.

### **Dampak Positif**

Pengaruh Positif Pengaruh positif yang ditimbulkan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Satuan Keluarga Sangat Miskin (RTSM) secara khusus; Pertama-tama, mengurangi beban penggunaan RTSM dan membuat perbedaan keluarga anggota PKH untuk menyekolahkan anak sekolah di tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Saatnya, tingkatkan dukungan dalam pemeriksaan kesejahteraan sosial untuk menjamin pengaturan asupan gizi bagi lansia dan penyandang cacat. Dengan demikian, kesepahaman untuk meneliti berasal dari dampak pertama dan sesaat dapat dikatakan bahwa pengaturan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ke unit Keluarga Sangat Miskin (RTSM) sangat akomodatif dalam hal biaya pendidikan dan kesejahteraan. Karena yang paling diperhitungkan RTSM tidak menyekolahkan anaknya adalah karena variabel keuangan. Berdasarkan penelitian ini, keberadaan PKH terlihat bahwa unit keluarga yang sangat tidak mampu dapat meringankan beban untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Dapat memeriksa kesehatan anak-anak kecil, dan menjamin penerimaan gizi untuk orang tua dan orang cacat.

### **Dampak Negatif**

Sejak adanya Program Keluarga Harapan (PKH), wali penerima menjadi lamban serta tidak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap bantuan ini. Seperti yang diungkapkan oleh pendamping penerima bantuan, ia mengatakan bahwa Pemerintah terkadang tidak memberikan bantuan tepat waktu, terkadang bantuan tersebut mungkin terlambat 1 minggu atau bahkan sampai 1 bulan.

### **Penurunan Tingkat Kurang Mampu Program Keluarga Harapan (PKH)**

Untuk penurunan data kemiskinan tentunya bukan hanya bersumber dari hasil dari evaluasi PKH, tentunya ada juga dilibatkan Statistik, Bapeda, Tim Penanggulangan Kemiskinan, dan Dinas Sosial. Jumlah penerima Bantuan Sosial dapat berubah-ubah berdasarkan pelaksanaan kegiatan Musyawarah pengusulan dan penindaklayakan di Desa dan Kelurahan pada setiap bulannya.

Berikut data penerima PKH dari tahun 2019 sampai dengan sekarang 2023:

2019	90 KPM
2020	90 KPM
2021	85 KPM
2022	87 KPM
2023	87 KPM

Sumber: Koordinator PKH Kelurahan Kerasaan 1

## **Pendataan Penerima Masyarakat Miskin PKH di Kelurahan Kerasaan 1**

Adapun hasil penelitian dengan Pendamping PKH di Kelurahan Kerasaan 1 yaitu:

### 1. Wawancara atau Interview

Wawancara ini dilakukan bersama pendamping PKH yang membahas tentang bagaimana cara untuk merekrut atau memasukkan calon anggota baru ataupun penerima PKH yaitu langkah awalnya dengan dilakukan pendataan terlebih dahulu. Pendataan tersebut didata oleh pihak RT. Dokumen yang diperlukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, foto rumah dan kartu tanda penduduk. Setelah dokumen tersebut diterima oleh RT, diserahkan ke pendamping PKH. Setelah pendamping menerima data tersebut kemudian diserahkan ke Kelurahan Kerasaan I, selanjutnya pihak kelurahan menyerahkan ke Kabupaten Simalungun, lalu dari pihak Kabupaten Simalungun menyerahkan data-datanya ke Pusat untuk diproses.

Untuk pengumuman perekrutan bahwasannya keluarga tersebut dapat menerima bantuan PKH, diumumkan 6 bulan setelah perekrutan. Dana bantuan PKH disalurkan secara bertahap empat kali dalam setahun, dengan interval tiga bulan, dan hampir tidak ada kendala dalam proses penyalurannya. Hal ini disebabkan karena semua penerima bantuan PKH sudah mendapatkan akses untuk mengambil dana melalui ATM, dan dalam situasi tertentu, penyaluran melalui kantor pos juga dapat diakomodasi. Jika ada penerima bantuan yang sakit atau tidak mampu untuk datang ke kantor pos, biasanya pihak kantor pos akan mengirim petugas untuk melakukan pendataan di rumah penerima PKH, yang didampingi oleh RT serta pendamping PKH.

Pada bulan Januari 2023, pemerintah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 452.575.000 untuk wilayah Pematang Bandar bantuan PKH disalurkan tunai ke masyarakat. Untuk perorangnya menerima Rp 600.000,- per 3 bulan. Rata-rata penerima PKH ialah 80% lansia. Pada bulan Januari 2023, wilayah Pematang Bandar memiliki 605 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH), sementara wilayah Kerasaan 1 memiliki 86 KPM. Seluruh penerima PKH di kedua wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dampak dari adanya PKH sangat baik serta menolong perekonomian rakyat sebab di PKH tidak hanya memberikan pertolongan saja tetapi juga ada pelatihan ataupun sosialisasi kesehatan dan pencegahan kemiskinan (Wawancara, 26 Mei 2023.).



*Gambar 2: Bersama Pendamping PKH di Kelurahan Kerasaan 1*

## 2. Observasi

Sebagai hasil dari temuan ini, peneliti menyadari bahwa dokumen program pengentasan kemiskinan secara keseluruhan berisi Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga berpenghasilan rendah dan rentan. Program Keluarga Harapan berupaya memutus siklus kehancuran, memerangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kurang mampu. Dengan cara ini, PKH menawarkan bantuan dan memudahkan keluarga penerima untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sosial. Keluarga penerima bantuan PKH tidak merasakan adanya kerugian dibandingkan dengan masyarakat yang bukan penerima bantuan.

## 3. Dokumentasi

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap bulannya yaitu:



*Gambar 3: Sosialisai PKH di Balai Kelurahan Kerasaan 1*



*Gambar 4: Bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM)*



*Gambar 5: Mengambil Bantuan di Kantor Pos Kelurahan Kerasaan 1*

## **Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Menurut buku pedoman kerja pendamping, tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah untuk membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan sumber daya manusia dari populasi yang sangat kurang mampu. Tujuan jangka pendek termasuk membantu Keluarga Sangat Miskin dalam menurunkan biaya konsumsi mereka. Untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi, tujuan jangka panjangnya adalah memaksa keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan mewajibkan mereka memvaksinasi anak kecil, menyekolahkan anaknya, memeriksa kandungan ibu hamil, dan memeriksakan pada wanita hamil.

Pendamping menjadi ujung tombak Program Keluarga Harapan. Pendamping ialah orang yang direkrut serta ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI untuk menjalankan amanah pelayanan PKH. Pendamping PKH ialah mata ataupun telinga PKH-nya memastikan proses kerja di lapangan memastikan tercapainya tujuan program Keluarga Harapan. Pendamping PKH memiliki tugas utama untuk membuat program ini berjalan dengan baik. Peran kelembagaan, mediasi serta advokasi, khususnya dalam membujuk Keluarga Penerima PKH (KPM) untuk mendapatkan kesejahteraan, pembinaan dan administrasi sosial. Pendamping PKH juga harus menjamin bahwa PKH KPM memenuhi komitmennya di bawah Tatanan Perubahan Perilaku PKH KPM. Demikian bagian yang disalurkan oleh Pendamping PKH di Kota Kerasan I Kecamatan Pumatan Bandar Kabupaten Simalungun.

Pendamping PKH dapat membentuk Kelompok PKH-KPM tergantung wilayah yang didukung dalam menjalankan tugasnya. Pastikan para pendamping memantau dan

mengadakan pertemuan untuk memastikan bahwa pengaduan dari keluarga penerima manfaat dikomunikasikan dengan baik dan benar. Keluhan dalam bentuk apapun terkait dengan Program Manfaat Keluarga Harapan. Kelompok di setiap pemukiman juga dapat memfasilitasi petugas bantuan dalam memberdayakan keluarga penerima kegunaan, pemutakhiran dokumen, pengawasan distribusi bantuan, dan penuntasan problema implementasi PKH.

KPM wajib ikut serta dalam pelaksanaan PKH. Keterlibatan KPM tidak lepas dari peran pendampingnya dalam mengarahkan KPM. KPM berkesempatan mengikuti Musyawarah Pembangunan Keluarga (P2K2) rutin bulanan. Hal yang sama berlaku untuk partisipasi KPM dalam penggunaan Layanan.

Untuk faktor penghambat pelaksanaan program keluarga harapan keluraha kerasaan I Yang terlihat adalah protes dari mereka yang merasa tidak mampu dan tidak didukung, dengan kata lain kecemburuan masyarakat. Pendamping tetap mengkomunikasikan pemahamannya kepada masyarakat selain penerima manfaat, karena mereka tidak memutuskan siapa yang menerima bantuan.

Berdasarkan pengantar BAPPENAS (Badan Penataan Kemajuan Nasional), status kesejahteraan seseorang dapat diukur berdasarkan luas pemanfaatan keluarga. Keluarga yang makmur dapat dikatakan jika tingkat investasi pada kebutuhan esensial impas dengan atau lebih rendah dari tingkat investasi pada kebutuhan non-dasar. BKKBN (Badan Penataan Keluarga Berencana Nasional) Kesejahteraan keluarga mengacu pada kondisi dimana sebuah keluarga telah terpenuhi semua kebutuhan fisik, mental, dunia lain dan sosial. Di bawah kondisi tersebut, keluarga dapat hidup nyaman dalam memahami dengan lingkungannya, sekaligus menjamin anak mendapatkan rasa aman yang mendasar untuk berkembang, berkreasi, dan berkreasi secara kokoh serta mengembangkan sikap dan identitas mental. Diharapkan anak-anak dapat menjadi aset manusia yang berkualitas di masa depan.

Dengan mendapatkan bantuan sembako, keluarga penerima kegunaan bisa memakai sebagian dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan non pangan lainnya contohnya keilmuan, kesehatan, sandang serta barang tahan lama. Keluarga penerima manfaat akan memaksimalkan uang yang diterima. Jika KPM pemasukkan yang diperoleh untuk kebutuhan yang dibutuhkan daripada yang diinginkan. Kami menyalurkan pandangan khusus untuk mendidik anak-anak kami agar mereka dapat menggunakannya sesuai dengan komponen yang mereka terima. Ada pula KPM-nya yang mengelola pertolongan *cash* yang sebagian dipakai sebagai modal untuk memulai usaha agar ibu yang merupakan penerima keluarga dapat menambah penghasilannya tanpa harus selalu bergantung pada penghasilan suaminya.

## **KESIMPULAN**

Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. PKH merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan memberikan bantuan sosial berupa tunjangan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Melalui PKH, keluarga miskin di Kelurahan Kerasaan I mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Bantuan tunjangan dari PKH dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak, pemeriksaan kesehatan, serta sebagai modal usaha atau pengembangan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. PKH juga memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada keluarga miskin. Hal ini membantu mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Program ini tidak hanya finansial, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan, penyuluhan tentang kesehatan dan gizi, serta pembinaan dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Dampak PKH tidak seperti yang terlihat pada tingkat individu, tetapi lebih dari itu berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan keluarga secara umum. Bantuan yang diberikan membuat perbedaan mengurangi beban keuangan keluarga miskin, peningkatan akses ke layanan pendidikan dan kesejahteraan. Dampak bantuan PKH terhadap fakir miskin ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah sangat mengurangi beban pada unit Keluarga Sangat Miskin sehingga mereka dapat memberikan bantuan kepada keluarga yang berkepentingan untuk membiayai biaya pendidikan dan meningkatkan minat dalam pemeriksaan kesejahteraan dan kesejahteraan sosial untuk menjamin penerimaan yang sehat dari orang tua dan cacat. Sementara dampak negatifnya adalah beberapa saksi yang apatis dan masih bergantung pada bantuan Bantuan Sosial.

Tingkat penurunan PKH di Kelurahan Kerasaan 1 setiap tahunnya berubah-ubah. Dan setelah pemerintah mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat tentunya ada, tetapi sebelumnya tidak ada yang mengatakan tidak mampu sebelum PKH ini terbuka sedemikiannya. Sejak ada PKH ini di publikasi banyak masyarakat yang mampu sebenarnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- 'Ayun, Y. Q., Safei, A. A., & Azis, A. (2021). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(2), 167–186. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i2.24051>
- Departemen Agama RI, A.-Q. dan T. (n.d.-a). *Q.S At Taha :124*.
- Departemen Agama RI, A.-Q. dan T. (n.d.-b). *QS. Al-Baqarah [2]: 201*.
- Hanif, H., Fatimah, D., Zubaedah, A., Juhriati, Suvianita, K., Adhi, W., & Maci, Z. (2020). Mewujudkan program keluarga harapan (pkh) yang lebih bermakna: analisa gender terhadap implementasi pkh di kabupaten sidoarjo (jawa timur) dan

kabupaten bima (nusa tenggara barat). In *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* (Vol. 2, Nomor 1).  
<http://eprints.untirta.ac.id/833/%0Ahttp://etd.eprints.ums.ac.id/14871/%0Ahttp://doi.org/10.1016/j.cell.2017.12.025%0Ahttp://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-risikesdas-2018.pdf%0Ahttp://www.who.int/about/licensing/%0Ahttp://jukeunil>

- Mahmud, F., Mustari, N., & Haq, N. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 17–33. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3396>
- Murah. (2016). Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial. *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 4(4), 120–128.
- Rahmi Ulfa Aulia. (2022). Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Piai Tengah. *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 5(3), 248–253.
- Rosalina, S. Y. (2019). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*.
- Royani. (2021). *Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Teorng Tawah Kecamatan Labuapi*.
- Sosial, Kementerian. (2019). *Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pedoman Pelaksanaan PKH 2019*.
- Sosial, Kesejahteraan. (2009). *UU No. 11 Tahun 2009*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Suharto, E., & Thamrin, D. (2012). Program Keluarga Harapan (Pkh): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa. *Jurnal Aspirasi*, 3(1), 1–20.
- Utomo, D., Hakim, A., & Ribawanto, H. (2019). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 29–34.
- Wawancara. (n.d.). Wawancara. *dengan ibu ega yana putri (Pendamping PKH)*.
- WUMU, C. P. (2019). Dampak Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77), 32–40.
- Yandra, A., Setiawan, H., Sella, N., Prihati, P., & Derin, T. (2020). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 168–176. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.119>
- Yusdha, N. A., Mardziah, A., & Putra, I. M. (2022). Strategi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Covid-19 Di Langkat, Binjai, Dan Karo. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(2), 259. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i2.14083>

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Vol 6 No 1 (2024) 591-606 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i1.2286

Zaenudin. (2017). *Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Pendidikan Anak di Desa Pengembur Kecamatan Pujut Tahun 2016/2017.*

Wawancara dengan Bapak Syafaruddin Simanjuntak S.ip (Koordinator PKH Kelurahan Kerasaan 1), Rumah Beliau, 01 Juni 2023, 14:36

Wawancara dengan ibu Evi Susanti (Keluarga Penerima Manfaat Kerasaan 1) Rumah beliau, 28 Mei 2023, 09:15